

TESIS

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA DI
BERLAKUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/ PUU-XIII/2015 SESUAI ASAS AUTENTIFIKASI**



Diajukan Oleh :

NAMA : LAILA YUNITA,S.H

NIM : 2220216320009

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2024

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA DI
BERLAKUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/
PUU-XIII/2015 SESUAI ASAS AUTENTIFIKASI**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Dalam Program Magister Ilmu
Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

LAILA YUNITA, S.H

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2024

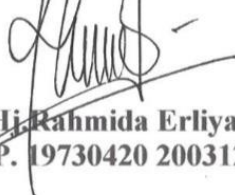
**Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....**

PEMBIMBING



**Suprpto
NIP. 19810517 200501 1 001**

**Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Pogram Magister Kenotariatan**



**Hi Rahmida Erliyani
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum**



**Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laila Yunita, S.H

NIM : 2220216320009

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung

Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU- XIII/2015 SESUAI ASAS
AUTENTIFIKASI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat Pernyataan

Laila Yunita, S.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 598/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Laila Yunita

Dengan Judul Tesis :

Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/Puu-XIiii/2015 sesuai Asas Autentifikasi

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 05 Oktober 2024

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



**Usulan Penelitian Tesis ini
Telah Dinilai di Depan Sidang
Panitia Penilaian Ujian Tesis
Pada hari Jum'at**

Susunan Panitia Penilaian

**Ketua : H. Rahmadi Usman
Penguji : Hj. Rahmida Erliyani
Pembimbing : Suprpto**

RINGKASAN

Terdapat dua pejabat yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Terdapat dualisme

kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Frasa “disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris”, menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian dalam masyarakat maupun dalam kalangan profesi notaris, apakah notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, tesis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Kewenangan Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sesuai dengan Asas Autentifikasi ? 2. Bagaimana penerapan asas autentifikasi dalam perjanjian perkawinan dalam pengaturan penambahan Kewenangan Notaris ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk mengetahui Kewenangan Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sesuai dengan Asas Autentifikasi. 2. Untuk mengetahui Penerapan asas autentifikasi dalam perjanjian perkawinan dalam pengaturan penambahan Kewenangan Notaris. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dalam tesis ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (State Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban bahwa: pertama, Kewenangan Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari asas autentifikasi yaitu bahwa kewenangan Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan yang awalnya perjanjian perkawinan itu dibuat secara tertulis menggunakan akta di bawah tangan lalu disahkan atau Notaris mengeluarkan akta autentik yang diberi judul akta perjanjian perkawinan yang isi perjanjian itu berdasarkan perjanjian para pihak. Kedua, Penerapan Asas

Autentifikasi Dalam Perjanjian Perkawinan untuk pengaturan penambahan Kewenanga Notaris adalah semua yang berkaitan dengan keperdataan apalagi yang berkaitan dengan pembuatan pengesahan suatu perbuatan hukum yang perbuatan itu terkait perjanjian harus dikeluarkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang- Undang.

**PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 SESUAI ASAS
AUTENTIFIKASI**

ABSTRAK

Oleh :

Laila Yunita, Suprpto

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, 118 Halaman

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Kewenangan Notaris, Putusan Mahkamah

Konstitusi

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/1015 sesuai dengan Asas autentifikasi serta Penerapan Asas autentifikasi Perjanjian Perkawinan dalam penambahan Kewenangan Notaris.

Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang – Undangan (*State Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comprative Approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan sesuai asas autentifikasi dikarenakan kewenangan Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan yaitu membuat perjanjian perkawinan yang pada awalnya perjanjian perkawinan tersebut berbentuk perjanjian dibawah tangan sehingga dirubah menjadi akta perjanjian perkawinan agar perjanjian tersebut mengikat para pihak (suami dan istri), serta untuk Penerapan asas autentifikasi dalam perjanjian perkawinan dalam pengaturan penambahan kewenangan Notaris maka pemerintah harus segera membuat pengaturan terbaru terkait pelaksanaan untuk menjalankan Jabatan Notaris dan membuat aturan baru untuk pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan serta menetapkan lembaga yang berkaitan dengan keperdataan agar akta yang dibuat oleh notaris tidak menjadi akta dibawah tangan.

serta agar para pihak dapat membuktikan telah melakukan pembuatan akta perjanjian perkawinan di kantor Notaris maka akta tersebut harus di daftarkan ke

lembaga yang berkaitan dengan keperdataan yang di naungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti AHU (Administrasi Hukum Umum).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan lindungannya karena atas ijin dan kuasanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “ **ASAS AUTENTIFIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA BERLAKUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**” . Tesis ini diajukan sebagai Salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada para Pihak yang telah membantu Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir, kepada:

1. Bapak Prof. Faisal,S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H.M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis sehingga selesai penelitian tesis ini;
3. Ibu Prof. Dr. Rahmida Erliyani,S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Bapak Ibu Dosen beserta staff yang terlibat dalam Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Bapak dan Ibunda Tercinta H. Muhammad Taberani dan Hj. Gusti Yuniarti yang telah memberikan dukungan serta doa yang tak pernah putus untuk penulis serta kasih sayang yang tak terhingga;
6. Ibu Notaris Gusti Puspa Kartasari, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Banjarmasin, yang telah memberikan pelajaran serta nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan studi Kenotariatan;
7. Kaka – kaka serta adek tercinta, yang selalu memberikan motivasi serta dukungan selalu;

8. Ibu Mariam, S.H dan Bapak Erick Ricardo,S.H.,M.Kn selaku sahabat yang dengan begitu sabarnya memberikan bimbingan serta saran – saran dalam penulisan penelitian;
9. Sahabat-sahabatku, Nyimas Siti Rahma Fitriyani dan Noor Laila Hayati, yang banyak membantu serta memberikan ketulusan dalam berteman;
10. Bapak Kim Namjoon, Bapak Kim Seok Jin, Bapak Min Yoongi, Bapak Jung Ho Seok, Bapak Park Jimin, Bapak Kim Tae Hyung, Bapak Jeon Jungkook, yang telah memberikan support untuk menulis agar bisa meraih gelar magister;
11. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2022 Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

Penulis menyadari Sepenuhnya Bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, baik bentuk maupun materinya. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dan koreksi yang membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Kenotariatan , AMIN.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis
Laila Yunita, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN SERTIFIKAT BEBAS PLAGIAT

RINGKASAN

ABSTRAK

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 9 |
| C. KEASLIAN PENELITIAN | 10 |
| D. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN | 11 |
| E. TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| E. METODE PENELITIAN | 35 |
| 1. JENIS PENELITIAN | 35 |
| 2. PENDEKATAN PENELITIAN | 35 |
| 3. SIFAT PENELITIAN | 37 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 4. | SUMBER BAHAN PENELITIAN | 37 |
| 5. | TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM | 38 |
| G. | SISTEMATIKA PENULISAN | 39 |
| BAB II | KEWENANGAN NOTARIS TERKAIT PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SESUAI DENGAN ASAS AUTENTIFIKASI | |
| A. | Kewenangan Notaris Di Dalam Undang-Undang | 41 |
| B. | Pengeshan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris | 49 |
| | a) Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi | 49 |
| | b) Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi | 56 |
| C. | Kewenangan Notaris Tekait Pengesahan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomo 69/PUU- XIII/2015 Sesuai Dengan Asas Autentifikasi | 65 |
| BAB III | PENERAPAN ASAS AUTNTIFIKASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PENGATURAN PENAMBAHAN KEWENANGAN NOTARIS | |
| A. | Asas Autentifikasi Dalam Perjanjian Perkawinan | 70 |
| B. | Penerapan Asas Autentifikasi Dalam Perjanjian Perkawinan Dalam Pengaturan Penambahan Kewenangan Notaris | 87 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 94 |
| B. | Saran | 96 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. Alur pembuatan Perjanjian Perkawinan sebelum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 56

BAGAN 2. Alur pembuatan Perjanjian Perkawinan sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 65